

# **KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERKAIT MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA**

**Rico Sanjoko<sup>1</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

## **ABSTRACT**

Indonesia's foreign policy under the administration of President SBY in the first period showed a positive direction. This change is shown by the more active Indonesia in contributing various ideas in international fora and in relation to interactions with other countries. The policy regarding sending peacekeeping missions under the umbrella of the United Nations has been in the spotlight along with the vision of President SBY to make Indonesia a Top Ten Troops Contribution Country. This policy certainly cannot be separated from input in both external and internal contexts, therefore this study analyzes the foreign policy determinants of President SBY related to increasing Indonesia's contribution to the UN peacekeeping mission using the theory proposed by James Rossenau. This research was conducted using a qualitative approach to collect primary data in the form of interviews and literature studies related to the determinants of Indonesia's foreign policy. Based on the research conducted, it is found that there are several factors that determine Indonesia's foreign policy related to increasing contributions to the UN peacekeeping mission during the 2004-2009 period of President SBY's administration as described by Rossenau, namely; systemic factors related to Indonesia's interaction with its international environment, government bureaucratic factors related to the encouragement and aspirations of stakeholders, in this case the democratic party as the ruling party, the TNI elite, and strategic industries and finally the ideosyncretic factors that are the most dominant in determining The foreign policy is related to the personal experience of President SBY, who served as head of military supervisor while he was still an active member of the TNI. Meanwhile, societal/community factors are not a determinant in the formulation of policies related to increasing Indonesia's contribution to the UN peacekeeping mission in the era of President SBY's administration for the 2009-2014 period.

**Keywords:** Systemic, bureaucracy, ideosyncretic, TNI, TCC

## **ABSTRAK**

Kebijakan luar negeri Indonesia dibawah pemerintahan Presiden SBY pada periode pertama menunjukkan arah perubahan yang positif. Perubahan ini ditunjukkan dengan semakin aktifnya Indonesia dalam menyumbangkan berbagai gagasan dalam fora internasional maupun kaitan dengan interaksi dengan negara lain. Kebijakan mengenai pengiriman misi pemeliharaan perdamaian dibawah payung PBB menjadi sorotan seiring dengan visi dari Presiden SBY untuk menjadikan Indonesia sebagai *Top Ten Troops Contribution Country*. Kebijakan tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari input baik dalam konteks eksternal maupun internal, oleh karena itu penelitian ini melakukan analisis terhadap determinan kebijakan luar negeri dari Presiden SBY terkait peningkatan kontribusi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh James Rossenau. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data primer berupa hasil wawancara serta studi kepustakaan terkait dengan determinan kebijakan luar negeri Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh temuan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi determinan kebijakan luar negeri Indonesia terkait peningkatan kontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di masa Pemerintahan Presiden SBY periode 2004-2009 seperti yang dijelaskan oleh Rossenau yakni ; *faktor sistemik* yang terkait dengan interaksi Indonesia dengan lingkungan internasionalnya, *faktor birokrasi pemerintahan* terkait dengan dorongan serta aspirasi dari pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah partai demokrat sebagai partai penguasa, kalangan elit TNI, serta industri strategis dan terakhir adalah *faktor ideosinkretik* yang paling dominan dalam menentukan kebijakan luar negeri tersebut yakni terkait dengan pengalaman pribadi Presiden SBY yang pernah bertugas sebagai kepala pengawas militer saat masih aktif menjadi anggota TNI.

Sementara *faktor societal/ masyarakat* tidak menjadi determinan dalam perumusan kebijakan terkait dengan peningkatan kontribusi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB pada era pemerintahan Presiden SBY periode 2009-2014.

**Kata Kunci:** sistemik, birokrasi, ideosinkretik, TNI, TCC

## PENDAHULUAN

Masa pasca perang dingin, secara nuansa dan substantif, diperkaya dengan bergesernya paradigma umum yang tadinya hanya berkuat tentang isu konvensional (tradisional) seperti kekuatan militer dan perang-perang berskala besar semata, kini juga dilengkapi dengan mengaburnya batas kedaulatan negara akibat isu-isu global (isu-isu nonkonvensional) yang tidak mengenal sekat dan tingginya interdependensi antarnegara dunia (Mauna, 2005, pp. 720-721). Sebelum era tahun 1990-an, atau persisnya selama masa Perang Dunia I dan II hingga era Perang Dingin, isu-isu keamanan nasional dan/atau kekuatan militer secara dominan merupakan dasar utama dari kebijakan politik luar negeri mayoritas negara dunia (Nye Jr, 1997, pp. 50-59).

Era baru pasca perang dingin, telah membawa dinamika baru dalam memahami konsepsi keamanan. Kondisi ini terkait dengan munculnya ancaman-ancaman keamanan baru dalam ruang lingkup global yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ancaman keamanan baru yang kemudian menjadi perhatian secara global adalah perkembangan konflik, dari konflik yang terjadi antar negara menjadi konflik antar masyarakat dalam sebuah negara atau yang dikenal dengan konflik internal. Meskipun kemudian tidak dapat dikesampingkan bahwa konflik yang melintasi batas negara masih kerap terjadi dan mengganggu stabilitas kawasan maupun global. Hingga berakhirnya perang dingin, masih terdapat beberapa kawasan yang menjadi titik rawan konflik yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari banyak pihak.

Perubahan dinamika internasional ini membawa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam memelihara keamanan dan perdamaian dunia harus beradaptasi dengan tantangan baru. Tantangan hadir khususnya pada pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian sebagai instrumen langsung PBB untuk berkontribusi dalam pencegahan dan penyelesaian konflik yang terjadi. Tantangan ini hadir dari perluasan tipe konflik yang bersifat antar negara (intra-state) menjadi antar masyarakat didalam negara (intra-state). Sejak tahun 1948 PBB telah terlibat dalam lebih dari 71 misi pemeliharaan perdamaian, dimana 53 diantaranya digelar setelah berakhirnya perang dingin yakni setelah tahun 1990 (Todd, 2017, p. 1876). Gelar operasi ini juga dilakukan pada berbagai wilayah tergantung pada skala konflik yang berpotensi terjadi serta melibatkan ribuan pasukan yang berasal dari negara-negara anggota PBB.

Keikutsertaan Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian telah dimulai pada tahun 1957 dalam misi perdamaian di Mesir dengan mengirimkan 557 personil (Anwar, 2014). Sejak keterlibatan dalam misi perdamaian di Mesir, pemerintah Indonesia terlibat dalam berbagai misi perdamaian di wilayah lain dimana pasukan penjaga perdamaian asal Indonesia dikenal dengan *Indonesian Garuda Contingent* (IGC) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kontingen Garuda (Konga). Indonesia melalui Kontingen Garuda TNI telah melaksanakan berbagai misi berbagai belahan dunia. Berbagai misi yang diikuti oleh Kontingen Garuda TNI telah mendapatkan banyak apresiasi terkait dengan kontribusi yang diberikan dalam kesuksesan setiap misi. Dimana seperti halnya kepemimpinan Indonesia dalam misi UNEF II

sangat dihargai dalam menjaga terlaksananya perjanjian damai diantara Mesir dan Israel yang pada saat tersebut berkonflik.

Bagi Indonesia, kontribusi pasukan TNI dalam *peacekeeping operation* PBB sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan keamanan dan perdamaian dunia telah menjadi amanat yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4. Amanat tersebut memberikan dasar kepada Indonesia untuk menjalankan politik luar negeri secara aktif dalam rangka ikut serta memelihara perdamaian dunia, beriringan dengan kebebasan dalam menjalankan politik luar negeri tanpa terikat kepada negara lain. Salah satu bentuk dari kebijakan Indonesia untuk berkontribusi dalam penciptaan perdamaian dunia adalah dengan keterlibatan dalam pengiriman pasukan perdamaian dibawah misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa/ PBB.

Keterlibatan pemerintah Indonesia dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian mulai mengalami penurunan saat awal pemerintahan Presiden Soeharto hingga awal tahun 1990an, kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk memaksimalkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melakukan stabilisasi keamanan dalam negeri. Pada masa ini Indonesia hanya mengirimkan kontingen dalam jumlah yang tidak terlalu besar serta dengan misi yang meliputi *military observer* maupun personil pendukung lainnya.

Indonesia kembali aktif mengambil bagian dalam misi perdamaian PBB pada awal tahun 1990an di berbagai wilayah. Berdasarkan data per 31 Agustus 2016 Indonesia melalui Kontingen Garuda TNI mengirimkan sebanyak 2.840 personil yang tergabung dalam misi *peacekeeping operations* dibawah misi UNIFIL (Lebanon), UNAMID (Darfur, Sudan), MINUSCA (Repubik Afrika Tengah), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), MINUSMA (Mali), MINURSO (Sahara Barat), MINUSTAH (Haiti), UNMIL (Liberia), UNMISS (Sudan Selatan), dan UNISFA (Abyei, Sudan). Jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke 12 dari 124 negara anggota PBB yang berkontribusi terhadap *peacekeeping operation* yang digelar.

Salah satu misi perdamaian dimana Indonesia telah lama menjadi kontributor dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian adalah pada *United Nations Interim Forces in Lebanon* (UNIFIL) di wilayah Lebanon Selatan. Data yang publikasikan oleh UN *Departement of Peacekeeping Operation* (DPKO) tahun 2016 menunjukkan bahwa Indonesia berkontribusi sebanyak 1.296 personil dalam misi UNIFIL sehingga menjadi negara peringkat pertama dalam jumlah pasukan yang berkontribusi didalamnya. Saat ini Indonesia tengah berupaya untuk meningkatkan perannya di UNIFIL. Upaya peningkatan peran Indonesia dalam UNIFIL tersebut ditunjukkan dengan pengiriman kapal perang untuk bergabung dalam *UNIFIL Maritime Task Forces*.

Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menempatkan misi pemeliharaan perdamaian PBB menjadi sebuah kebijakan strategis. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia yang diantaranya adalah dengan mendirikan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian – Tentara Nasional Indonesia (PMPP – TNI) di Sentul Bogor sebagai badan untuk mempersiapkan pasukan pemelihara perdamaian Indonesia sesuai dengan permintaan PBB (Agussalim, 2013). Pembentukan PMPP – TNI merupakan sebuah bukti keseriusan dari Indonesia dalam rangka meningkatkan kesiapan dari personil yang akan menjadi bagian dari misi pemeliharaan PBB.

Disamping itu Indonesia berupaya untuk meningkatkan posisinya sebagai TCC di PBB dengan tujuan untuk masuk dalam top ten *Troops Contribution Countries* (TCC) dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Untuk mewujudkan target tersebut Indonesia mentargetkan

4.000 personil yang akan dikirimkan sebagai bagian dari misi pemeliharaan perdamaian PBB pada tahun 2019 (Hutabarat, 2014) (Cappie, 2016). Keinginan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia menginginkan peran yang lebih besar dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Meskipun dalam mewujudkan keinginan tersebut tidak akan menjadi sesuatu hal yang mudah terkait dengan permasalahan yang harus dihadapi oleh Indonesia maupun TNI. Kendala utama yang harus dihadapi oleh Indonesia adalah keterbatasan anggaran pertahanan, seperti yang diketahui bahwa anggaran pertahanan Indonesia masih berada pada posisi dibawah 1% dari GDP. Karena meskipun menggunakan dana yang diberikan PBB dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian, Indonesia menggunakan sistem wetlist yang artinya dana operasional akan di tanggung oleh Indonesia sebelum dilakukan reimburs oleh PBB. Permasalahan lain adalah masih tingginya sorotan internasional terhadap TNI terkait dengan tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan pada saat melaksanakan operasi militer di Aceh dan Papua.

Beranjak dari realitas dimana saat Indonesia memiliki ambisi untuk meningkatkan peran dalam misi pemeliharaan perdamaian namun dihadapkan kepada kendala yang harus dihadapi baik pada level domestik maupun level internasional menjadi ironi tersendiri dalam kebijakan Indonesia tersebut. Atas dasar permasalahan tersebut membawa peneliti menuangkan kedalam proposal usulan penelitian yang berjudul: **Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Masa Pemerintahan Tahun 2009-2014.**

## **KERANGKA ANALITIK**

Penelitian ini akan didasarkan pada tradisi pemikiran realis. Pemikiran realis oleh peneliti dianggap relevan untuk mengkaji masalah yang akan diteliti terkait dengan pilihan-pilihan rasional yang dikedepankan oleh negara maupun pengambil kebijakan dalam rangka memperoleh keuntungan dan meminimalisir kerugian. Melalui tradisi pemikiran realisme peneliti mencoba menjelaskan dan mempermudah dalam menganalisa kebijakan luar negeri Indonesia terkait dengan peningkatan partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Melalui lensa realisme ini menyatakan bahwa politik dalam rangka mencapai kepentingan akan dimainkan dalam corak yang realistis. Oleh karena itu, dalam tradisi berpikir realis, politik dianggap sebagai perjuangan untuk mendapatkan *power, power* didefinisikan sebagai suatu hubungan yang bersifat psikologis dimana salah satu aktor mampu mengendalikan perilaku aktor lain dimana yang dijadikan aktor dalam pendekatan realis ini adalah negara sebagai aktor utama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, hal ini didasarkan pada objek penelitian yang terkait dengan alasan yang melatarbelakangi kebijakan Indonesia untuk meningkatkan kontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB merupakan realitas sosial dipandang sebagai suatu gejala atau fenomena yang bersifat dinamis, holistik, kompleks, dan penuh makna. Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek alamiah, atau natural setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut metode naturalistik, dimana peneliti menggambarkan objek penelitian secara apa adanya berdasarkan data yang didapat melalui pengamatan

fenomena, studi literatur dan wawancara yang menempatkan peneliti sebagai instrumen penelitian (Sugiyono, 2007, p. 1).

Disamping itu, merujuk Afrizal (2014, p. 30), menyatakan bahwa menggunakan pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut, Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah sebagai alasan karena terbiasa melakukan penelitian dengan metode tersebut. Penulisan Tesis ini merupakan kajian analisis yang berarti peneliti percaya bahwa penelitian kualitatif terbaik untuk bidang kajian mengenai kebijakan luar negeri Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

Penelitian ini melihat bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia terhadap misi pemeliharaan perdamaian PBB dengan merujuk pada input atau determinan kebijakan luar negeri. Kondisi ini dilakukan mengingat bahwa Indonesia dalam sejarahnya seperti yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian telah menunjukkan kontribusinya dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB, namun pada tahun 2009-2014 dibawah pemerintahan kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Indonesia membangun sebuah ambisi untuk meningkatkan postur serta eksistensi dalam misi pemeliharaan perdamaian dengan keinginan menjadi masuk sebagai sepuluh besar TCC. Fenomena tersebut dalam penelitian ini akan dilihat berdasarkan dorongan dari:

### **A. Faktor Sistemik**

Faktor sistemik merupakan sebuah keterkaitan antara aktor dalam hubungan internasional yang akan menentukan tindakan yang diambil secara resiprokal. Dalam konteks sistemik kebijakan sebuah negara akan ditentukan oleh tindakan dari negara lain (Fearon, 1998). Sebuah negara akan membentuk pandangan atas kebijakan yang diambil ataupun akan diambil negara-negara lain sehingga negara harus memberikan perhatian serta respon atas lingkungan internasionalnya.

Bagi Indonesia kontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB merupakan instrumen kebijakan luar negeri yang sangat penting hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Hubatarat, 2014) secara eksplisit menemukan bahwa misi tersebut adalah bagian dari pelaksanaan kebijakan luar negeri bagi Indonesia. Ambisi untuk meningkatkan peringkat Indonesia sebagai TCC dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB jika didasarkan pada faktor sistemik dalam perumusan kebijakan luar negeri maka merupakan bagian dari bagaimana Indonesia merespon perubahan yang terjadi dalam dinamika hubungan antar negara maupun aktor-aktor lain dalam lingkungan strategis hubungan internasional Indonesia itu sendiri.

Perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan senantiasa menjadi dasar bagi upaya Indonesia dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dunia. Dimana pada awal millennium baru, masih terdapat beberapa konflik yang berpotensi tidak hanya berdampak pada keamanan dan stabilitas internasional namun lebih dari itu berpotensi menimbulkan bencana kemanusiaan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang memadai untuk meningkatkan kapasitas dari kontingen yang terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian yang digelar oleh TNI.

Dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas personil Presiden SBY kemudian membangun sebuah pusat pelatihan terpadu yang berlokasi di Sentul Bogor yakni Pusat Misi

Pemeliharaan Perdamaian (PMPP). Pembangunan fasilitas tersebut menunjukkan sebuah komitmen kuat bahwa dalam mencapai ambisi untuk masuk dalam sepuluh besar TCC PBB tidak hanya bertumpu kepada jumlah namun juga pada kemampuan yang dimiliki oleh personil asal Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Disamping itu komitmen Indonesia tersebut ditujukan untuk membangun kesadaran negara-negara lain bahwa upaya untuk berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian juga merupakan bagian dari penguatan persahabatan antar negara ditengah adanya dualisme pandangan terkait isu teorisme serta tindakan unilateral AS dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pesan mengenai nilai-nilai kemanusiaan yang diangkat oleh Indonesia melalui kontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian merupakan upaya untuk menghilangkan stigma negatif khususnya yang ditujukan pada TNI. Stigma negatif terhadap TNI tidak dapat dilepaskan dari berbagai kasus pelanggaran HAM dalam operasi militer yang dilakukan di Timor Timur, Aceh maupun Papua. (Ma`mum, 2009, p. 1). Kontribusi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi etalase untuk menunjukkan profesionalisme serta wajah TNI yang berpihak pada aspek kemanusiaan dan perdamaian kepada masyarakat internasional. Oleh karena itu misi pemeliharaan perdamaian PBB memiliki makna strategis bagi Indonesia dimana dengan keterlibat dalam operasi perdamaian, TNI berperan untuk melakukan proses diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. Atas peran perdamaian yang dijalankan, pasukan Indonesia turut menyumbang soft power berupa pencitraan baik di dunia.

Citra baik Indonesia di mata dunia internasional tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk beradaptasi dalam perubahan lingkungan internasional yang saat ini mengarah pada isu penghormatan terhadap nilai demokrasi dan HAM. Kondisi dibuktikan dengan semakin gencarnya berbagai kampanye baik oleh pemerintah maupun aktor non-negara untuk melakukan tekanan terhadap baik secara ekonomi maupun politik kepada negara yang dianggap melakukan pengabaian terhadap hal tersebut. Indonesia sendiri pernah mengalami tekanan internasional terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI melalui embargo persenjataan yang hampir membuat TNI kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ALUTSISTA dalam pengamanan wilayah Indonesia serta peningkatan kapasitas personil. Kondisi ini diperburuk dengan potensi adanya campur tangan asing baik negara maupun lembaga internasional apabila citra Indonesia dalam penegakan HAM tidak segera diperbaiki.

Kondisi tersebut yang kemudian membuat Indonesia perlu untuk meningkatkan postur untuk berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Kontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB memiliki gengsi yang sangat tinggi antara negara- negara anggotanya, tercatat ada 100 negara berkeinginan agar pasukan tentaranya terlibat dalam misi perdamaian. Meski memiliki sejarah pelanggaran HAM, tren permintaan TNI menjadi bagian dari pasukan perdamaian terus meningkat terlebih pasca perang dingin. Visi dari Presiden SBY dalam rangka meningkatkan kontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian tentu menjadi sebuah hal yang membanggakan, diantara banyak pesaing tentara kita menjadi salah satu yang dipilih. Sedangkan negara-negara yang pada awalnya sangat dominan dalam keterlibatan pasukan perdamaian saat ini justru mulai mengalam tren penurunan.

Perhatian dunia internasional terhadap permasalahan kemanusiaan direspon oleh TNI dengan menampilkan wajah lain, yang jauh dari citra pelanggar HAM yang selama ini melekat. Dalam berbagai misi yang diemban baik pada masa lalu hingga era saat ini, sebagai pasukan perdamaian, pasukan TNI kini tidak sekedar peace keeping, namun sudah pada tahapan peace building. Yaitu pasukan perdamaian yang membangun sekolah, membangun rumah sakit, jalan dan lain-lain. Personil yang terlibat tidak hanya mengandalkan teknik bertempur namun

pasukan TNI untuk perdamaian yang mengajar, mendidik dan lain-lain. TNI tetap menjaga integritas moral, skill dan pengetahuan yang dimiliki. Bahkan program pemberdayaan wilayah pertahanan/pembinaan teritorial yang seringkali dijalankan di dalam negeri turut menyumbang keberhasilan TNI sebagai pasukan dalam setiap misi perdamaian PBB yang diikuti.

Berdasarkan aspek internasional yang dihadapkan pada kondisi domestik di Indonesia khususnya apa yang menjadi citra dari TNI selama ini dimata dunia internasional sebagai determinan dalam menentukan kebijakan luar negeri Indonesia pada masa presiden SBY. Terlebih Presiden SBY senantiasa berusaha untuk meningkatkan dan memperbaiki citra Indonesia melalui pandangan keluar *outward looking*-nya. Misi pemeliharaan perdamaian ini menjadi arena yang dapat digunakan secara efektif oleh Indonesia dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki citra buruk yang selama ini melekat, khususnya bagi TNI. Dengan demikian maka, peningkatan kontribusi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di era SBY tidak dapat dilepaskan dari faktor eksternal yakni terkait dengan faktor sistemik yang berkembang dalam fora internasional terkait dengan demokrasi dan penghormatan terhadap HAM.

## **B. Faktor Masyarakat (*Societal Sources*)**

Kebijakan luar negeri merupakan sebuah proses yang akan melibatkan kepentingan dari banyak aktor. Dorongan terhadap sebuah kebijakan luar negeri tidak hanya berdasarkan atas interaksi dalam level sistemik semata, namun juga melibatkan dinamika yang ada pada level domestik. Pilihan sebuah negara terhadap kebijakan luar negeri yang akan diambil bisa dihasilkan dari interaksi yang dihasilkan dari aktor-aktor domestik. Argumen yang dikemukakan oleh (Fearon, 1998) menyebutkan bahwa karakter karakter khas dari sebuah negara akan mampu secara relevan memberikan penjelasan mengenai pemilihan kebijakan atau interaksi politik tertentu yang akan membawa keragaman implementasi kebijakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam upaya untuk mengakomodir kepentingan domestik, kebijakan luar negeri dibuat dalam rangka mempertahankan kekuasaan dari pemerintah yang berkuasa pada saat tersebut.

Demokrasi yang menjadi salah satu ciri dalam sistem pemerintahan Indonesia, memberikan ruang terbuka bagi masyarakat untuk memberikan suara terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tidak terbatas pada kebijakan yang bersifat domestik namun juga kebijakan luar negeri. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam menyuarakan aspirasi terhadap pemerintah maupun pemerintah yang secara pro-aktif meminta masukan kepada masyarakat. Pada masa pemerintahan Presiden SBY untuk menghimpun masukan dari kalangan masyarakat senantiasa diadakan berbagai forum diskusi dari berbagai kalangan untuk memperoleh pandangan mengenai kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, khususnya kebijakan luar negeri. Meskipun tidak jarang pula aspirasi yang kemudian diusung disampaikan melalui aksi lapangan untuk menuntut sebuah kebijakan dapat berubah atau diambil. Sebagai contoh terkait dengan perubahan sikap Indonesia pada permasalahan nuklir Iran, dimana Indonesia mengubah posisi dari abstain menjadi mendukung setelah berbagai massa islam mengadakan serangkaian unjuk rasa sebagai bentuk solidaritas terhadap Iran.

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap kebijakan Indonesia dibawah Presiden SBY dalam pengiriman misi pemeliharaan perdamaian PBB ini, faktor societal atau masyarakat tidak menjadi determinan yang signifikan. Kondisi ini didasarkan pada tidak adanya kesadaran

maupun pengetahuan dari masyarakat Indonesia mengenai pentingnya Indonesia menjadi bagian dari misi tersebut. Fakta ini ditemukan dilapangan saat melakukan pengamatan dilapangan serta wawancara dengan masyarakat, dimana mereka sama sekali tidak memiliki perhatian terhadap kebijakan tersebut dan cenderung hanya memberikan jawaban normatif. Jawaban normatif tersebut terkait dengan selama hal tersebut memang baik untuk dilakukan tidak menjadi permasalahan bagi mereka, dan upaya penambahan postur pasukan dalam misi seperti yang dicanangkan oleh pemerintah sama sama sekali tidak diketahui meskipun sebagian besar dari masyarakat tidak keberatan dengan hal tersebut.

Masyarakat Indonesia cenderung memberikan dukungan terhadap misi yang dijalankan oleh TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Dukungan ini merupakan kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap peran aktif dalam turut serta menjaga ketertiban dunia. Meskipun tidak disuarakan melalui berbagai aksi yang menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan peningkatan misi pemeliharaan perdamaian, namun tidak adanya resistensi terhadap kebijakan ini menjadi indikator nyata dari dukungan tersebut. Terlebih dengan demokratisasi politik, meningkatnya peran masyarakat sipil dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dapat menjadi penghambat bagi pemerintahan SBY untuk merealisasikan kebijakan tersebut.

Bagi masyarakat Indonesia, keterlibatan dari TNI dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari upaya TNI untuk menunjukkan kapabilitas serta eksistensinya dalam ruang lingkup internasional. Fakta menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat Indonesia terkait dengan keterlibatan TNI pada misi pemeliharaan perdamaian PBB dapat dilihat pada pemberitaan yang dilakukan oleh media arus utama maupun media daring tertentu.

Observasi yang dilakukan terhadap media-media arus utama pun memberikan perhatian pada pemberitaan mengenai misi-misi yang dijalankan oleh kontingen pasukan Garuda di lapangan. Pemberitaan yang cukup mendalam serta berkelanjutan dapat ditemukan pada media-media daring tertentu. Hal ini membuktikan bahwa informasi mengenai keterlibatan Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB sangat baik serta pemberitaan tersebut masih dalam tataran informatif bukan kritis. Pemberitaan kritis mengenai sebuah fenomena khususnya kebijakan akan menjadi bukti bahwa adanya tekanan atau aspirasi masyarakat yang ingin diakomodir oleh pemerintahan SBY terkait keterlibatan aktif Indonesia misi pemeliharaan perdamaian PBB.

### **C. Faktor Birokrasi Pemerintah**

Birokrasi akan memberikan warna dalam pengambilan kebijakan luar negeri, selayaknya yang dikemukakan oleh Rossenau. Politik birokrasi di dalamnya pembuat keputusan adalah lembaga pemerintah, yang terdiri dari satu set biro dengan sumber dan tanggung jawab yang berbeda, serta berbeda dalam tingkat pengaruhnya. Berbagai biro atau departemen bersaing di antara mereka sendiri untuk kesempatan untuk mempengaruhi keputusan menggunakan otoritas politiknya. Pengambilan keputusan dalam model ini adalah proses untuk mendapatkan kekuasaan pada pemerintahan. Strategi untuk membangun koalisi antar biro mungkin terjadi dalam model ini. Sistem persekutuan atau koalisi ini dalam perjuangan juga untuk mendapat pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

Kondisi ini membawa pada keterlibatan para birokrat dalam pemerintahan untuk mempengaruhi kebijakan dan tidak memberikan fokus terhadap pusat pembuatan kebijakan luar negeri. Dengan demikian maka para birokrat memiliki banyak pengaruh dalam perumusan kebijakan luar negeri. Demikian pula dalam konteks pengambilan kebijakan luar negeri yang

diteliti dalam penelitian ini terkait dengan ambisi untuk meningkatkan postur Indonesia sebagai Top Ten TCC UNPKO pada masa pemerintahan Presiden SBY.

Faktor birokrasi dalam pemerintahan SBY sebagai determinan dalam menentukan kebijakan Indonesia terhadap misi pemeliharaan perdamaian PBB tidak dapat dilepaskan dari alam demokrasi dan desentralisasi dimaa akan timbul banyak pusat kekuatan yang walaupun kecil akan menjadi daya pendorong yang cukup kuat terhadap kebijakan yang diambil. Terkait dengan peningkatan partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB yang merupakan bagian dari kebijakan luar negeri akan mendapatkan pengaruh dari perubahan atas demokratisasi maupun desentralisasi. Perubahan tersebut akan berdampak secara normatif maupun struktural, dimana perubahan ini terkait dengan leading sector serta proses yang dilalui dalam pembentukan kebijakan luar negeri.

Kondisi domestik yang cenderung stabil membuat bargaining terhadap para elit politik didalam negeri tidak mengalami kesulitan yang berarti. Stabilitas ini didukung pula oleh dominasi dari partai pengusung SBY yakni demokrat yang mampu untuk menjaga soliditas dalam koalisi untuk mendukung kebijakan SBY khususnya terhadap misi pemeliharaan perdamaian PBB. Dimana dalam sistem pengambilan kebijakan memerlukan persetujuan dari DPR serta pertimbangan dari kementerian keuangan untuk proses pembiayaan. Keterlibatan DPR dalam penentuan kebijakan ini merupakan bagian dari perubahan mendasar dalam relasi isu politik luar negeri dan publik Indonesia.

Pengambilan kebijakan luar negeri di masa pemerintahan SBY tidak lagi menjalankan model birokrasi elitis. Pengambilan kebijakan dalam birokrasi tidak lagi menjadi wilayah elit namun sudah menjadi isu yang memperoleh perhatian dan memberikan ruang terhadap aspirasi publik. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini akah memunculkan masalah terkait dengan benturan kepentingan serta potensi saling sandera dalam pengambilan kebijakan, namun presiden SBY mampu merangkul seluruh elemen baik pada kalangan elit maupun publik untuk mendukung visi kebijakan luar negeri yang salah satunya diwujudkan melalui peningkatan kontribusi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Kebijakan Presiden SBY tidak dapat dilepaskan dari upaya petinggi-petinggi di jajaran TNI, khususnya TNI Angkatan Darat (AD) untuk menjadikan misi pemeliharaan perdamaian sebagai wadah untuk peningkatan kapabilitas dan perbaikan citra TNI dimata internasional. Keberadaan dari PMPP yang berada di Sentul tidak dapat dilepaskan dari lobi-lobi yang dilakukan oleh para perwira TNI sebagai bagian dari peningkatan profesionalisme TNI, khususnya dalam misi pemeliharaan perdamaian. Dalam konteks ini SBY harus mampu untuk menampung aspirasi dari kalangan TNI yang tentu sangat dominan dalam mendukung stabilitas pemerintahan serta agenda kebijakan luar negeri pada masa tersebut.

Disamping permasalahan peningkatan profesionalisme, faktor ekonomi menjadi salah satu motivasi dari kalangan elit TNI. Peningkatan jumlah personil yang dikirimkan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB akan meningkatkan kesejahteraan dari para prajurit. Kondisi ini berkaca kepada tingkat kesejahteraan prajurit yang masih belum mencapai harapan. Dengan keterlibatan personil dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB setidaknya diyakini akan membawa peningkatan signifikan terhadap kesejahteraan mereka terkait dengan sistem pembayaran yang diberikan oleh PBB. Meskipun tidak semua prajurit akan memperoleh kesempatan untuk menjadi bagian dalam misi tersebut, namun dengan peningkatan jumlah yang dicanangkan oleh pemerintah maka semakin terbuka peluang agar banyak personil yang bisa merasakan penugasan di luar negeri dalam bentuk misi pemeliharaan perdamaian.

Aktor lain yang kemudian tidak dapat dikesampingkan adalah industri-industri pertahanan yang kemudian akan memiliki andil terhadap kebijakan pemerintah SBY. Dimana Pindad sebagai produsen utama ALUTSISTA bagi TNI pada akhirnya menjadikan misi pemeliharaan perdamaian yang melibatkan kontingen Garuda sebagai ajang untuk mempromosikan berbagai produk mereka. Dengan demikian, Industri strategis akan meyakinkan pemerintah SBY untuk menempakan misi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai bagian dari promosi untuk menarik pembeli. Upaya menarik pembeli ini harus dilakukan dengan meyakinkan bahwa produk mereka layak dan mampu beroperasi pada medan tempur serta dapat diandalkan. Atas dasar tersebut maka buka menjadi sebuah rahasia bahwa dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya pada masa pemerintahan Presiden SBY terkait misi pemeliharaan perdamaian mengusung kepentingan dari industri strategis yang dimiliki oleh Indonesia.

Berdasarkan pada penjelasan diatas maka hal ini membuktikan apa yang dijelaskan oleh (Toma & Gorman, 1991) bahwa politik luar negeri merupakan sebuah proses yang terkait dengan bargaining, kompromi dan penyesuaian dengan pemerintah akan dianalogikan sebagai sekumpulan individu serta organisasi. Dimana dampak yang akan muncul adalah bahwa kebijakan tidak akan dilihat sebagai sebuah produk yang didasarkan pada rasionalitas melainkan dari proses interaksi diantara para aktor yang terlibat yang dalam hal ini adalah dari kalangan partai politik pendukung yakni Partai Demokrat dan kalangan oposisi, para elit di jajaran TNI, serta industri-industri strategi dan penyesuaian dari berbagai individu yang ada pada lingkaran pemerintahan serta organisasi pemerintahan yang dibentuk untuk mendukung kekuasaan dari Presiden SBY.

#### **D. Faktor Ideosinkretik**

Kebijakan luar negeri tidak dapat dilepaskan pula dari gaya kepemimpinan dari seorang Presiden maupun Kepala Pemerintahan. Analisis ini menjadi salah satu faktor penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri menurut Rossenau. Meskipun demikian (Coulumbis & Wolfe, 1990) melihat bahwa pendekatan ideosinkretik akan lebih mudah diterapkan pada pengambilan kebijakan di negara-negara yang memiliki kecenderungan otoriter. Peneliti dalam hal ini tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan tersebut, mengingat bahwa dalam negara yang demokratis seperti Indonesia, warna kebijakan luar negeri senantiasa mengusung ide maupun gagasan dari Presiden yang tengah berkuasa.

Pemerintahan SBY yang berkuasa sejak tahun 2004 diposisikan sebagai pengelola kekuasaan eksekutif yang memiliki kewenangan untuk memformulasikan dan menjalankan kebijakan nasional baik dalam ranah domestik maupun luar negeri. Ideosinkretik sendiri akan menjadi faktor subjektif yang dapat menentukan elemen kebijakan nasional Indonesia di masa pemerintahan SBY. Dimana SBY sebagai individu akan membawa pengaruh subjektif terhadap kebijakan yang dibuat, khususnya dalam penelitian ini terkait dengan kebijakan luar negerinya. Suryadinata (1996, p. 3) menyebutkan bahwa faktor kepribadian atau ideosinkratik merupakan satu dari serangkaian faktor yang menentukan bagaimana politik luar negeri Indonesia dijalankan. Dengan demikian maka, faktor subjektif ini akan melekat secara inheren yang mewarnai pola-pola kebijakan nasional khususnya pada ranah kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Presiden SBY.

Indonesia pada masa pemerintahan Presiden SBY memiliki karakter internasionalis dan *high profile*. Fakta ini dapat ditemukan pada bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden SBY ditujukan untuk meningkatkan eksistensi serta citra Indonesia di panggung

internasional. Kebijakan terkait dengan peningkatan kontribusi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB menjadi contoh dari upaya yang dilakukan oleh Presiden SBY dalam program kebijakan luar negeri pada masa pemerintahannya. Pandangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari bagaimana kepribadian yang dimiliki oleh Presiden SBY sebagai seorang individu yang terbentuk dari berbagai pengalaman.

Merujuk pada pengalaman pendidikan, selama menjalani pendidikan tingkat dasar, SBY aktif mengikuti kegiatan kepanduan sebagai gambaran SBY memiliki perhatian pada praktek kepemimpinan. Selain itu, SBY pun gemar membaca buku, khususnya cerita perwayangan yang turut membantu proses pembentukan kepribadian SBY menjadi sosok yang santun, sabar dan bersahaja. Di masa remaja, SBY berhasil masuk ke pendidikan militer di Akademi Militer Nasional. Memasuki tahun kedua di AKABRI (Akademi Militer saat ini), SBY mendapat pangkat sebagai Sersan Taruna dan berkat pangkat tersebut, tanggungjawab SBY meningkat karena harus menjadi Komandan Divisi Korps Taruna dan menjadi pemimpin dari sekitar 3000 taruna militer (Maeswara, 2009).

*Political personality* atau kepribadian politik seorang pemimpin, secara umum terbentuk dari faktor bayangan masa depan semenjak kecil. Seperti yang ditulis oleh Jerrold M. Post, mengutip teori *adult development* yang dicetuskan oleh Daniel J. Levinson bahwa bayangan masa depan seseorang terbentuk dari mimpi, dimana mimpi tersebut adalah idola di masa kecil (*childhood heroes*) dan mentor yang diperhatikan selama masa muda (Post, 2006). Memiliki seorang ayah yang berprofesi sebagai tentara, kemudian bayangan memiliki masa depan sebagai tentara semenjak tingkat sekolah dasar menjadi alasan kuat bagi SBY memiliki tekad besar untuk berkarir di TNI-AD. Dari sejarah kenaikan pangkat dan jabatannya, SBY memiliki perjalanan yang cukup baik dengan penghargaan di bidang pendidikan militer yang pernah diterima. Mengemban pendidikan militer di luar negeri, beberapa diantaranya mendapatkan prestasi yang baik. Pembekalan dalam mengolah strategi pun juga diperoleh SBY. Budaya Jawa yang melekat pada diri SBY turut serta membentuk kepribadian SBY dalam berpolitik. Cara pandang SBY terhadap penyelesaian konflik adalah dengan cara sabar untuk menyudahi masalah. SBY meyakini, setiap konflik ada solusi damai.

Dalam sebuah forum, SBY menyampaikan 9 ide mengenai rekonsiliasi dan resolusi konflik untuk menciptakan perdamaian. Secara garis besar, SBY menekankan perlunya pendekatan yang fleksibel dalam menghadapi konflik, bukan pendekatan yang *rigid*. Hal itu diperlukan agar rekonsiliasi tercapai dan memiliki efek dalam jangka panjang. Pasca-rekonsiliasi, tentunya perlu ada pengendalian dan pengelolaan agar konflik dapat dihindari. Untuk menciptakan rekonsiliasi dan resolusi konflik yang tepat sasaran, SBY menyatakan perlu ada tindakan dari seorang pemimpin yang tepat pula. Tepat dalam arti seorang pemimpin yang mampu mengarahkan dan mendorong proses politik dan seorang pemimpin adalah orang yang memiliki keberanian dalam membuat keputusan sulit dalam kondisi apapun termasuk menghadapi resiko yang akan muncul. Melalui 9 ide diatas, dapat diperoleh pandangan umum dari seorang SBY mengenai pola pengelolaan konflik yang dapat dihadapi dalam situasi tertentu (Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2012).

Berkaca pada argument diatas bahwa ideosinkretik akan menjadi determinan dalam kebijakan luar negeri Indonesia dalam peningkatan kontribusi misi pemeliharaan perdamaian PBB, meskipun Indonesia buka sebagai negara otoriter dibawah pemerintahan Presiden SBY. Peningkatan kontribusi serta postur kontingen Garuda dibawah mandat PBB tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengalaman yang dimiliki oleh SBY yang pernah menjadi bagian dari personil lapangan yang terlibat dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian. SBY saat

masih aktif sebagai anggota TNI pernah memperoleh kepercayaan sebagai kepala Pengamat Militer PBB merangkap komandan untuk Kontingen Indonesia yang bertugas di Bosnia, bekas pecahan Yugoslavia. Dimana pada saat itu tugas utamanya adalah untuk mengawasi gencatan senjata diantara para pihak yang bertikai di wilayah tersebut. Berdasarkan sejarah karir militer SBY terdapat dalam tulisan (Alberthine, 2013), SBY memperoleh kenaikan pangkat yang terbilang cepat dibandingkan rekan-rekan seangkatannya yakni menjadi Brigadir Jenderal TNI.

Atas pengalaman tersebut SBY melihat bahwa misi pemeliharaan perdamaian PBB mampu menjadi wadah untuk meningkatkan karir dan kompetensi dari prajurit. Meskipun demikian tidak menampilkan bahwa masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh personil TNI dilapangan dalam menjalankan tugasnya dalam misi tersebut. Oleh karena itu gagasan untuk membangun PMPP menjadi bagian dari visi yang dimiliki oleh Presiden SBY untuk mengatasi kendala tersebut. Pemikiran ini seperti yang dikutip dalam (Munawaroh, 2011), muncul berdasarkan pengalaman pribadinya saat menjadi salah satu pasukan perdamaian yang dikirim ke Bosnia. Kondisi yang ada saat itu 38 negara yang mengirim pasukannya dan disebar di enam wilayah. Indonesia pun mengirim sekitar 650 perwira. Namun sayang, dari ratusan perwira itu hanya sedikit yang menjadi pimpinan grup karena terkendala bahasa, keahlian menyeter, dan kurangnya pengetahuan soal misi perdamaian.

Keberhasilan Presiden SBY dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Pengamat Militer PBB saat aktif menjadi anggota TNI dianggap mampu untuk meningkatkan citra negara. Kondisi ini terkait dengan kemampuan dari personil yang berasal dari negara berkembang untuk memimpin kontingen dari negara-negara lain. Dalam masa kepemimpinannya Presiden SBY berusaha menggunakan karisma pribadinya dengan mengambil sebagian peran Menlu di dalam melakukan pendekatan dengan setiap mitra dialog guna memperoleh kepercayaan mereka akan keseriusan SBY di dalam memenuhi setiap komitmennya. Salah satu komitmennya adalah untuk meningkatkan keaktifan Indonesia dalam ikut memelihara ketertiban dunia yang diimplementasikan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Melalui politik luar negeri Bebas Aktif, Presiden SBY mencoba untuk melakukan pemaknaan kembali dengan mencoba untuk menekankan pada kata aktif yang diimplementasikan dengan peningkatan personil dalam misi pemeliharaan PBB serta dalam visi menjadi sepuluh besar TCC UNPKO. Penguatan atas politik luar negeri bebas aktif kemudian dituangkan dalam gagasan "*A million friends zero enemy*" ("sejuta kawan tanpa satupun lawan") dan "*all direction foreign policy*" ("politik luar negeri kesegala arah") merupakan gagasan yang digunakan SBY untuk merepresentasikan politik bebas-aktif Indonesia. Maksud dari gagasan tersebut agar Indonesia mampu mengubah musuh menjadi teman, dan mengubah teman menjadi mitra; memiliki kapasitas diplomatik, intelektual dan emosional untuk menanggapi isu-isu kebijakan luar negeri yang rumit; dan tidak mempercayai teori konspirasi, kecurigaan yang berlebihan, bersikap terlalu defensif, atau rasa takut bahwa dunia akan menguasai kita.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan luar negeri menjadi sebuah kajian yang perlu memperhatikan berbagai aspek. Dengan menggunakan teori dari James Rossenau, penelitian ini mencoba untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2009-2014 dibawah kepemimpinan Presiden SBY

yang terkait dengan misi pemeliharaan perdamaian PBB. Indonesia pada periode tahun 2009-2014 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam postur pengiriman personil pada berbagai misi yang digelar oleh PBB saat dihadapkan oleh berbagai permasalahan yang dialami oleh TNI sebagai komponen utama dalam Kontingen Garuda TNI sebagai satuan yang dikontribusikan Indonesia untuk misi PBB. Permasalahan tersebut terkait dengan permasalahan keterbatasan anggaran, ALUTSISTA serta pandangan negatif mengenai TNI sebagai pelanggar HAM dimasa lalu.

Terlepas dari berbagai permasalahan tersebut, Presiden SBY kemudian mencanangkan visi agar Indonesia masuk menjadi sepuluh besar negara kontributor personil bagi misi pemeliharaan perdamaian pada tahun 2019. Kebijakan ini tentu menjadi sebuah fenomena yang tidak akan dilepaskan dari determinan kebijakan yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu hasil penelitian yang dituangkan dalam bab pembahasan sebelumnya telah menemukan bahwa berdasarkan determinan kebijakan luar negeri dari James Rossenau kebijakan Presiden SBY terkait dengan peningkatan kontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB hanya datang dari faktor sistemk, birokrasi pemerintah serta yang paling dominan adalah ideosinkretik dari Presiden SBY itu sendiri.

Penelitian ini menemukan bahwa dominasi dari faktor ideosinkretik dalam kebijakan luar negeri Indonesia terkait peningkatan kontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian tidak dapat dilepaskan dari pengalaman pribadi Presiden SBY saat masih aktif bertugas menjadi anggota TNI yang pernah menjadi Kepala Pengawas Militer bagi PBB di Bosnia. Pengalaman ini yang kemudian menjadi dasar dari berbagai gagasan dari Presiden SBY dalam mengimplementasikan gagasan-gagasan yang terkait dengan keterlibatan Indonesia dalam misi pemeliharaan PBB baik terkait dengan pengiriman personil maupun peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mauna, B. (2005). *Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni.
- Nye Jr, J. (1997). *Understanding International Conflict*. New York: Longman
- Todd, S. (2017). International Peacekeeping Operations: Burden Sharing and Effectiveness. *Journal of Conflict Resolution* , 1875-1897.
- Anwar, D. F. (2014). Indonesia Peacekeeping Operations : History, Practice and Future Trend. In C. e. Aoi (Ed.), *Asia-Pacific Nations in International Peace Support and Stability Operations* (p. 189). New York: Palgrave Macmillan.
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Couloumbis, T. A., & Wolfe, J. H. (1990). *Introduction to International Relations: Justice and Power*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Coulumbis, T., & Wolfe, J. H. (1990). *Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power*. Bandung: Putra Abaradin.

Alberthine, E. (2013). *Kepak Sayap Putri Prajurit*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.